

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional di Indonesia meliputi seluruh aspek kehidupan, baik material maupun spiritual, dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan nasional secara intrinsik terhubung dengan pembangunan daerah, karena pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembangunan nasional. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal, yang pada gilirannya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Saat ini, tantangan utama bagi pemerintah daerah melampaui masalah otonomi dan desentralisasi; tantangan tersebut juga mencakup bagaimana meningkatkan daya saing daerah. Daya saing ini berkaitan dengan kemampuan ekonomi suatu daerah untuk mencapai pertumbuhan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Setiap daerah tentu berambisi untuk mempercepat pertumbuhan ekonominya guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan warganya.

Salah satu fokus utama pemerintah adalah pengembangan ekonomi daerah. Proses ini melibatkan upaya pemerintah daerah bersama masyarakat untuk secara efektif mengelola sumber daya yang ada. Selain itu, pemerintah daerah berperan dalam membentuk kemitraan dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Inisiatif ini bertujuan untuk merangsang aktivitas ekonomi yang akan membawa manfaat

jangka panjang bagi komunitas lokal, mendukung penciptaan peluang kerja, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Di era otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks. Salah satu isu utama adalah kesenjangan ekonomi antar daerah yang terus menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat dan tingkat kemiskinan yang belum sepenuhnya teratasi. Di sisi lain, pendekatan pembangunan yang masih bersifat sektoral seringkali tidak memperhitungkan karakteristik unik dan potensi sumber daya masing-masing wilayah, sementara sumber daya yang tersedia semakin terbatas. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah bagaimana merencanakan dan melaksanakan pembangunan ekonomi daerah secara efektif dan efisien. Ini melibatkan pemanfaatan secara maksimal potensi lokal, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia, serta pengoptimalan seluruh sumber dana yang tersedia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Globalisasi menuntut daerah-daerah di Indonesia untuk menghadapi tantangan kompetitif dalam konteks perdagangan bebas dengan produk-produk dari seluruh dunia. Untuk itu, pembangunan ekonomi daerah diharapkan dapat menghasilkan produk unggulan yang tidak hanya berkualitas tinggi tetapi juga mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional. Provinsi, kabupaten, dan kota sebagai garda terdepan dalam pembangunan ekonomi daerah harus mempercepat proses pembangunan dengan fokus pada pengembangan produk unggulan, agar tidak kalah bersaing di pasar global, setidaknya di tingkat regional mereka sendiri.

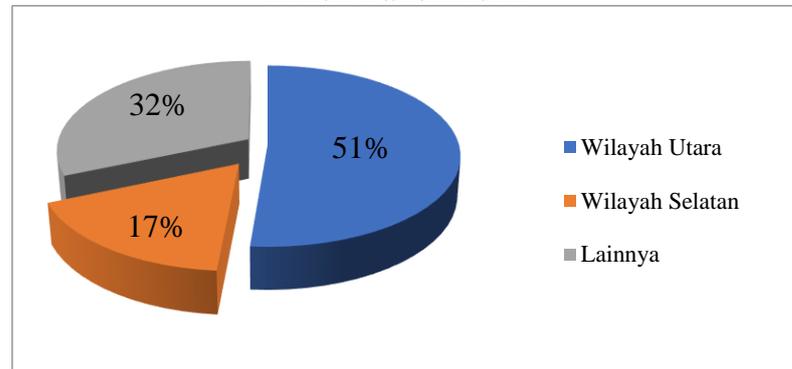
Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan percepatan dalam pengembangan produk unggulan yang berorientasi pasar. Hal ini melibatkan pemanfaatan peluang bisnis dan investasi yang ada secara optimal. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, diharapkan daya saing produk dapat meningkat dan memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ekonomi daerah. Ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk tetapi juga memperkuat posisi daerah dalam persaingan ekonomi yang semakin ketat.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu kontributor utama kedua bagi perekonomian Indonesia, dengan tingkat pertumbuhan ekonominya yang sejalan dengan rata-rata nasional serta provinsi-provinsi besar lainnya di pulau Jawa. Struktur perekonomian Jawa Timur didominasi oleh tiga sektor utama: industri pengolahan yang menyumbang 29,03% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), perdagangan dengan kontribusi 18,18%, dan pertanian sebesar 12,80% (BPS Jatim, 2023). Secara geografis, provinsi ini menawarkan potensi besar untuk pengembangan ekonomi berkat posisi strategisnya dan keberagaman objek wisatanya. Dari gunung, pantai, dan gua hingga air terjun, objek wisata ini hampir tersebar di seluruh kabupaten dan kota, menawarkan peluang besar untuk pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi lokal yang lebih luas.

Jawa Timur memiliki posisi strategis dan memainkan peran penting dalam kontribusinya terhadap perekonomian nasional, menjadikannya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi utama di Indonesia. Selama periode 2018-2022, provinsi ini menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan relatif sebanding dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dalam kurun waktu tersebut mencapai 5,98%, yang lebih

tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,09% pada tahun yang sama. Angka ini mencerminkan dinamika ekonomi Jawa Timur yang kuat dan kemampuannya untuk berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Gambar 1. 1. Persentase Kontribusi Wilayah terhadap Total PDRB Jawa Timur Tahun 2021



Sumber; BPS Jawa Timur (diolah)

Perbandingan pertumbuhan ekonomi antara wilayah utara dan selatan Jawa Timur menunjukkan perbedaan signifikan dalam kontribusi mereka terhadap perekonomian provinsi. Wilayah utara, yang mencakup kota-kota seperti Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, dan Situbondo, memberikan kontribusi yang jauh lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dibandingkan dengan wilayah selatan, yang meliputi Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Pacitan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, wilayah utara menyumbang 51,22% terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur. Sebaliknya, wilayah selatan hanya berkontribusi sebesar 17,2%, sementara wilayah lainnya menyumbang 31,44%. Data ini mencerminkan ketimpangan dalam kontribusi ekonomi antar wilayah di provinsi tersebut, dengan

wilayah utara menunjukkan peran dominan dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Dengan demikian, wilayah utara Jawa Timur memegang peranan yang lebih dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di provinsi ini, sementara wilayah selatan dan wilayah lainnya memberikan kontribusi yang lebih kecil. Hal ini menunjukkan adanya disparitas dalam kontribusi ekonomi antarwilayah di Jawa Timur yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh provinsi.. (Gambar 1.1).

Disparitas dalam pertumbuhan ekonomi ini terjadi sebagian karena kebijakan pembangunan di Jawa Timur hingga saat ini masih terfokus pada wilayah utara, yang cenderung mengarah pada terbentuknya pola monosentris yang menjadikan Kabupaten Pacitan sebagai pusatnya. Akibatnya, pembangunan ekonomi di wilayah utara menjadi relatif lebih maju dibandingkan dengan wilayah selatan. Selain faktor kebijakan yang lebih terpusat di wilayah utara, kondisi infrastruktur yang lebih baik—seperti jalan, listrik, dan pelabuhan—juga berperan dalam memberikan kontribusi yang lebih besar dari wilayah utara terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dibandingkan dengan wilayah selatan.

Konsentrasi pembangunan yang lebih kuat di wilayah utara ini tidak hanya menciptakan ketimpangan, tetapi juga menunjukkan bahwa pembangunan yang lebih merata di seluruh provinsi masih menjadi tantangan. Untuk mengatasi kesenjangan ini, perlu adanya kebijakan yang lebih inklusif dan berimbang, dengan memperhatikan kebutuhan infrastruktur dan pengembangan ekonomi di wilayah

selatan. Dengan demikian, seluruh wilayah di Jawa Timur dapat berkontribusi secara lebih proporsional terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi.

Tabel 1. 1 PDRB dan Kontribusi PDRB wilayah Selatan Jawa Timur

Wilayah	PDRB (Juta)		Kontribusi PDRB (%)	
	2021	2022	2021	2022
Kabupaten Malang	68.619,10	72.136,50	24,63	24,71
Kabupaten Banyuwangi	55.472,60	57.932,60	19,91	19,84
Kabupaten Jember	54.688,70	57.167,10	19,63	19,58
Kabupaten Tulungagung	27.390,40	28.818,90	9,83	9,87
Kabupaten Blitar	25.700,00	27.037,30	9,23	9,26
Kabupaten Lumajang	22.623,40	23.626,60	8,12	8,09
Kabupaten Trenggalek	12.959,00	13.545,40	4,65	4,64
Kabupaten Pacitan	11.107,40	11.722,40	3,99	4,01

Sumber; BPS Jawa Timur, 2023

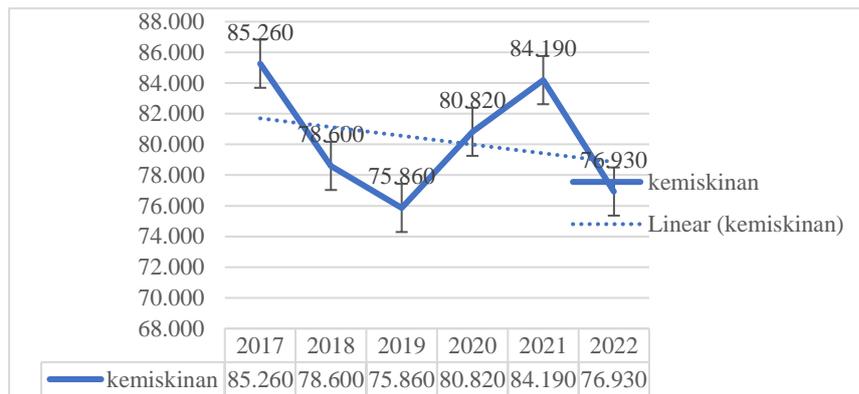
Di wilayah selatan Jawa Timur, Kabupaten Pacitan merupakan kontributor terendah terhadap PDRB provinsi, dengan kontribusi hanya sebesar 4,22 persen. Kabupaten Pacitan, yang terletak di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa dan berada di koridor tengah, memiliki topografi yang didominasi oleh pegunungan, perbukitan, dan daerah pesisir. Walaupun memiliki berbagai potensi ekonomi di sektor-sektor tertentu, pengembangan daerah ini tertinggal dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Timur. Ketertinggalan ini tercermin dari PDRB per kapita Kabupaten Pacitan, yang sering kali berada di posisi paling bawah dalam provinsi, mengindikasikan adanya kelemahan dalam pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah yang belum optimal.

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pacitan untuk periode 2010/2029, keterlambatan dalam perkembangan ekonomi daerah ini disebabkan oleh berbagai faktor. Sebagian besar wilayah Kabupaten Pacitan,

sekitar 85% dari total luasnya, merupakan daerah perbukitan yang menyulitkan pengembangan infrastruktur. Selain itu, keterbatasan infrastruktur seperti jaringan jalan dan akses ke air bersih juga menjadi kendala signifikan. Terbatasnya anggaran daerah memaksa pemerintah untuk mengutamakan sektor-sektor yang memiliki potensi tinggi untuk pengembangan, agar dapat mencapai pertumbuhan kesejahteraan yang berkelanjutan dan kompetitif. Jika pemerintah salah dalam menentukan prioritas sektor, dana yang tersedia dapat terbuang dengan sia-sia dan tidak akan memberikan dampak positif pada perkembangan ekonomi daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun, tingginya pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan pemerataan kesejahteraan. Proses Trickle-Down, yang diharapkan dapat mendistribusikan manfaat ekonomi secara merata kepada masyarakat, tampaknya belum berjalan efektif. Hal ini terlihat dari ketidakselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan. Meskipun jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, angka tersebut masih tergolong tinggi jika diteliti lebih mendalam. Oleh karena itu, diperlukan strategi baru yang lebih inovatif dan terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya di Kabupaten Pacitan. Detail lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada gambar 1.2.

Gambar 1. 2. Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pacitan



Sumber: BPS Pacitan, 2023

Berdasarkan Gambar 1.2, masih tingginya angka kemiskinan salah satunya disebabkan oleh potensi unggulan wilayah Kabuapten Pacitan belum dapat digali secara maksimal. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Pacitan adalah kurangnya pemahaman yang jelas mengenai sektor-sektor basis yang dapat secara signifikan menggerakkan sektor-sektor lainnya. Hal ini diperparah dengan kurangnya sinkronisasi antara berbagai pihak dalam mendorong kemajuan daerah. Program-program yang dijalankan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Pacitan sering kali tidak selaras, sehingga pencapaian program-program tersebut masih jauh dari optimal. Akibatnya, manfaat dari program-program tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.

Potensi unggulan wilayah Kabupaten Pacitan sejauh ini belum digali secara maksimal. Ketidakjelasan mengenai sektor-sektor basis yang dapat menggerakkan perekonomian daerah menjadi salah satu penyebab utama. Selain itu, belum adanya koordinasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten, membuat langkah-langkah untuk mendorong kemajuan daerah menjadi tidak sinkron. Oleh karena itu, pencapaian program-program pemerintah daerah

masih perlu ditingkatkan, dan manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.

Sejalan dengan prinsip otonomi daerah, setiap daerah memiliki hak dan kewajiban untuk menggali potensi yang dimilikinya. Setiap daerah memiliki keunggulan ekonomi yang berbeda, yang bisa menjadi sumber pertumbuhan wilayah. Oleh karena itu, strategi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Pacitan dituntut untuk mampu menggali sumber keunggulan ekonominya guna mempercepat pertumbuhan ekonomi serta menjamin distribusi pendapatan yang lebih merata, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Melihat berbagai persoalan di atas, perencanaan kebijakan investasi yang didasarkan pada potensi wilayah menjadi sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan. Hal ini juga berimplikasi pada penurunan tingkat disparitas wilayah di Jawa Timur. Untuk mendukung upaya tersebut, diperlukan kajian strategis yang menyeluruh terkait potensi ekonomi dan perencanaan daerah. Kajian ini akan menjadi kerangka kebijakan yang dapat diandalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan, sekaligus mempercepat proses pembangunan daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian terkait strategi pengembangan potensi ekonomi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan (kesejahteraan) di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

1. Sektor-sektor ekonomi apa saja yang masuk kategori basis di Kabupaten Pacitan?
2. Sektor-sektor ekonomi apa di Pacitan dengan sektor yang sama di Jawa Timur tumbuh lebih cepat?
3. Sektor-sektor apa yang menunjukkan pertumbuhan lebih cepat dengan sektor lain Di Kabupaten Pacitan?
4. Sektor ekonomi unggulan apa saja yang masuk kategori unggulan di kabupaten pacitan
5. Bagaimana perkembangan kemiskinan di kabupaten pacitan?

1.3. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari kegiatan potensi ekonomi dan perencanaan kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan. Tujuan jangka panjang yang diharapkan dari penelitian ini adalah dihasilkannya rumusan kebijakan sektoral pada Kabupaten Pacitan, sehingga memiliki differensiasi model kebijakan berdasarkan potensi daerah. Diharapkan, rumusan kebijakan ini menjadi pedoman dari setiap pengambilan keputusan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Pacitan. Untuk maksud tersebut dilakukan langkah-langkah dengan tujuan jangka pendek sebagai berikut:

1. Mengetahui sektor-sektor ekonomi apa saja yang masuk kategori basis di Kabupaten Pacitan.
2. Mengetahui sektor-sektor ekonomi apa di Pacitan dengan sektor yang sama di Jawa Timur tumbuh lebih cepat.
3. Mengetahui sektor-sektor apa yang menunjukkan pertumbuhan lebih cepat dengan sektor lain Di Kabupaten Pacitan.

4. Mengetahui sektor ekonomi unggulan apa saja yang masuk kategori unggulan di kabupaten pacitan
5. Mengetahui perkembangan kemiskinan di kabupaten pacitan.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi berharga bagi pengembangan teori dan konsep dalam ilmu pengetahuan ekonomi, terutama terkait dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini diharapkan dapat menjadi landasan pertimbangan untuk pembuatan kebijakan di masa yang akan datang.

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berharga dalam pengetahuan, memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai potensi sektor ekonomi dan pengaruh tenaga kerja terhadap kemiskinan di Kabupaten Pacitan.